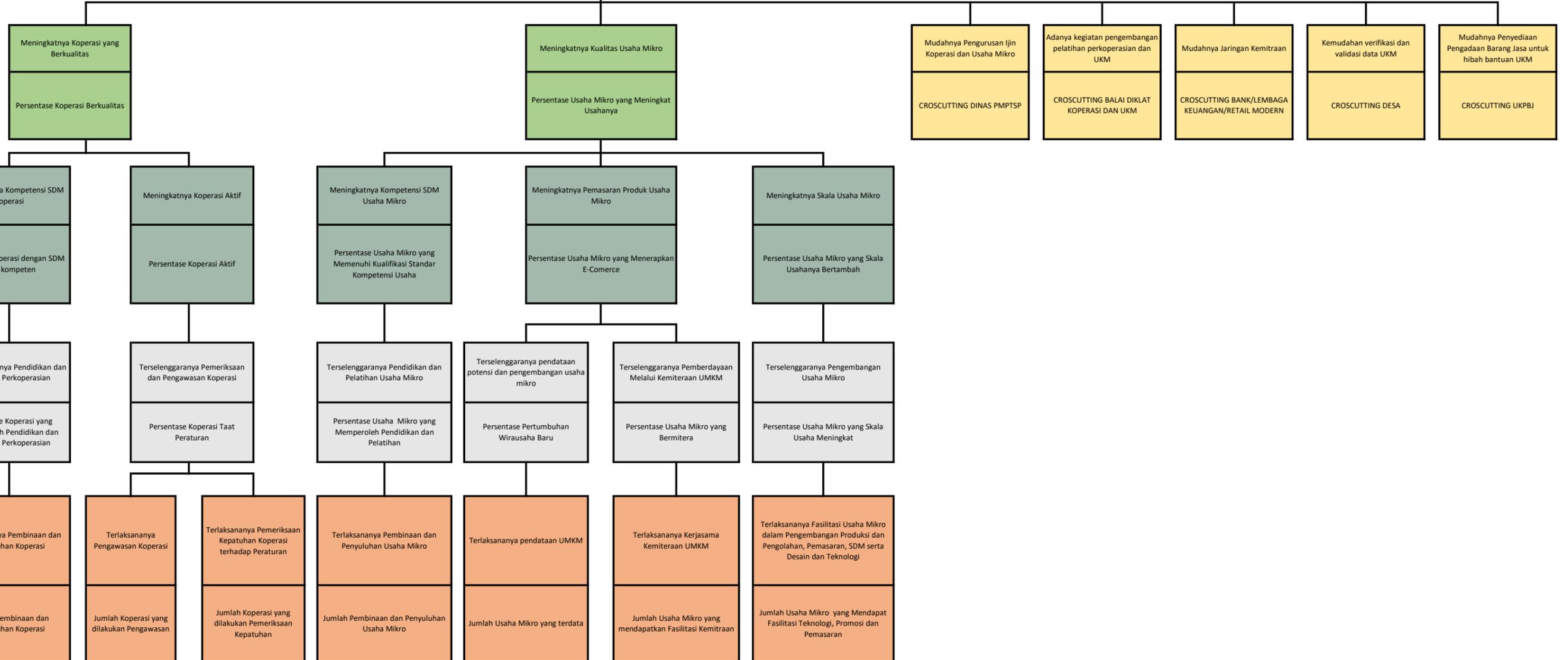


POHON KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MEMENGAH

Meningkatkan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Koperasi Berpredikat Sehat
Persentase Usaha Mikro Naik Kelas



POHON KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
URUSAN TENAGA KERJA

Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka
 Angka Pengangguran Terbuka

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap

Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja
 Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan

Meningkatnya Pendidikan Formal Angkatan Kerja
 CROSCUTTING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 1. Meningkatkan Investasi pada berbagai Sektor.
 2. Meningkatkan Kontribusi Industri, pariwisata, pertanian.

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
 (Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai kebutuhan Dunia Kerja)

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Kerja
 Persentase Kebutuhan Kerja yang Terpenuhi

Terciptanya keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja
 Rasio Kebutuhan Tenaga Kerja terhadap Persediaan Tenaga Kerja

Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
 Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya

Terselenggaranya peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
 Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja

Tersedianya LPKS yang berkualitas
 Jumlah LPKS yang melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja

Terselenggaranya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 Jumlah Tenaga Kerja yang kompeten

Terselenggaranya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 Jumlah Tenaga Kerja yang kompeten

Tersedianya informasi pasar kerja yang efektif
 Persentase Informasi Pasar Kerja yang Disebarluaskan

Tersedianya LPTKS yang berperan menyalurkan tenaga kerja
 Persentase LPTKS yang aktif

Terselenggaranya pelayanan antar kerja di Kabupaten Balangan
 (Persentase kerjasama antar kerja)

Terkoordinasinya kegiatan yang mengacu RTK
 Persentase Kegiatan yang Mengacu RTK

Terciptanya perusahaan/ pemberi kerja dengan tata kelola kerja yang layak
 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 Persentase perkara/pengaduan HI yang difasilitasi penyelesaiannya

Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi
 Jumlah tenaga kerja yang besertifikasi Vokasi

Terlaksananya pelatihan Vokasi
 Jumlah tenaga kerja yang besertifikasi Vokasi

Tersedianya Instruktur/Pelatih yang profesional
 (Jumlah Instruktur/Pelatih yang profesional)

Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar
 (Jumlah sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar)

Terlaksananya kerjasama pelatihan
 (Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui kerjasama dengan LPKS)

Terselenggaranya Konsultasi produktivitas bagi perusahaan kecil
 Persentase peningkatan produktivitas wirasaha kecil

Terlaksananya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 Jumlah Tenaga Kerja yang diukur kompetensinya

Tersedianya layanan Informasi pasar kerja
 (Jumlah pencari kerja dan peluang kerja)

Tersedianya bursa pasar kerja
 (Jumlah pencari kerja di bursa kerja)

Terlaksananya penyaluran Tenaga Kerja melalui LPTKS
 Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan melalui LPTKS

Terlaksananya penyaluran dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja sesuai kompetensinya
 (Jumlah peserta bimbingan jabatan)

Tersedianya layanan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
 (Jumlah tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja)

Terlaksananya Perluasan Kesempatan Kerja
 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan kesempatan kerja melalui perluasan kesempatan kerja

Tersedianya dokumen dan evaluasi rencana tenaga kerja Kabupaten
 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

Terfleksibilitasnya penyusunan RTK Mikro
 Jumlah SDM perusahaan yang memahami penyusunan RTK

Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan
 Jumlah PP yang disahkan

Tersedianya data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 Jumlah Pekerja pada perusahaan yang mendapatkan perlindungan hak-haknya

Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
 Jumlah potensi kasus Hubungan Industrial yang dicegah

Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Terselenggaranya operasional Tripartit
 Jumlah LKS tripartit yang diberdayakan